

Kebijakan Mengembalikan Beranda Negeri

Farah Zhafirah

1. Rekognisi

PIT atau Penangkapan Ikan Terukur (*digadang-gadang*) menjadi terobosan ciamik dari beragam polemik laut dan nelayan di negeri kita. PIT sendiri berfilosofi pada pembatasan penangkapan ikan guna menjaga jumlah stok ikan di laut, kebijakan yang (*secara teknis*) dibangun melalui pertimbangan ekologi dan ekonomi.

Setidaknya ada dua pendekatan pengendalian penangkapan yang selama ini digunakan oleh negara yang memiliki wilayah laut dan stok ikan, yaitu pengendalian penangkapan konvensional (tidak terukur) dan pengendalian penangkapan terukur. Pada intinya, **penangkapan konvensional** didasari oleh pengendalian input yaitu pengendalian yang dilakukan dengan perizinan tanpa memberikan kuota per kapal sehingga para pelaku usaha berlomba menangkap ikan sebanyak-banyaknya (*race to fish*).

Sedangkan **penangkapan terukur** didasari oleh pengendalian output yaitu pengendalian dengan mempertimbangkan kuota sehingga hasil tangkapan pelaku usaha berdasarkan kuota (*catch limit*). Penangkapan ikan terukur mengubah pendekatan *input control* yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, ke dalam pendekatan *output control*.

Banyak sekali negara yang telah mengadaptasi sistem penangkapan terukur, mulai dari Uni Eropa, Islandia, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Tentu saja, pengaturan penangkapan dengan model seperti ini mampu memberikan keunggulan baik dari perspektif ekonomi maupun ekologi. Mulai dari stok ikan dan kesehatan laut yang terjaga, pemerataan ekonomi daerah (karena pelabuhan pendaratan disesuaikan dengan wilayah penangkapan), akurasi data tangkapan, hingga optimalisasi industri hilir di pelabuhan perikanan.

2. Tuai Kontroversi

Meskipun berfilosofi pada keseimbangan ekologi dan ekonomi, kebijakan ini masih dinilai problematik oleh sebagian orang. Melansir dari Ringkasan Eksekutif Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dari Koalisi NGO untuk Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan (KORAL), terdapat beberapa kontroversi dari draft PP Penangkapan Perikanan Terukur dimulai dari :

1. Penetapan zona WPP-NRI yang berorientasi kepentingan ekspor dan perikanan skala besar sehingga perikanan berbasis adat/komunitas tidak dipertimbangkan dalam rencana kebijakan ini;
2. Penetapan zona perikanan lokal hanya di WPP-NRI 571, 712, dan 713 dan mengabaikan WPP lainnya;
3. Zona perlindungan hanya pada WPP 714 padahal seluruh WPP NRI memiliki Kawasan konservasi laut;
4. Penerapan sistem kuota Indonesia tidak punya pengalaman empiris;
5. Pemanfaatan kuota industri dilakukan dengan sistem kontrak dan izin berusaha yang memicu perburuan elit politik karena sistem ini bisa diperjualbelikan.

Jika ditilik kembali, point diatas nampaknya tengah menjadi persoalan yang kerap dipertanyakan ulang oleh sebagian orang. Bukan berarti tanpa masalah, kebijakan yang terkesan tergesa-gesa menjadi paradoks tata kelola sumber daya perikanan kedepannya. Terlebih, kebijakan ini bermuara pada eksploitasi untuk kepentingan investasi di wilayah pesisir, berpotensi mengakibatkan marginalisasi sosial, bahkan memicu peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK).

3. Sedang Adaptasi

Secara resmi, melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 50 tahun 2022, yang menetapkan tiga pelabuhan perikanan menjadi *pilot project* uji coba penerapan PIT, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan-Cirebon, PPN Ternate, dan PPN Tual. Uji coba PIT yang dilakukan berfokus pada penggunaan timbangan elektronik yang menjadi dasar pemungutan PNBP pasca-produksi (*bagian dari rencana PIT*). Berdasarkan kebijakan ini-pun, Pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp12 triliun pada tahun 2024. Kedepannya, PIT dikategorikan berdasarkan kuota nelayan lokal, kuota industri, dan kuota hobi, yang kemudian pelaku usaha akan mengajukan secara spesifik rencana penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Mengintip kesiapannya, PPN Kejawanan sebagai *pilot project* telah mempersiapkan segala alat dan sumber daya manusia. Saat ini, PPN Kejawanan telah mendapatkan delapan timbangan elektronik untuk menunjang pendataan Penangkapan Ikan Terukur, dan telah beroperasi dengan baik untuk kapal diatas 30 GT atau berizin pusat. Timbangan elektronik ini memiliki tingkat eror yang minim sehingga data timbangan bersifat representatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu, PPN Kejawanan telah melakukan pengadaan jasa pengolah data hasil tangkapan perikanan yang diharapkan dapat membantu proses enumerasi.

Pelaksanaan PIT melalui PNPB Pasca Produksi di lapangan mulai diterima dengan baik oleh stakeholder di PPN Kejawanan. Selain itu, kendala seperti koneksi internet, SDM untuk enumerator, maupun aksesibilitas timbangan mulai dapat dilaksanakan dengan baik.

Meskipun uji coba penerapan PIT di PPN Kejawanan telah menunjukkan progres yang apik, namun belum tentu di Pelabuhan lain menunjukkan dinamika yang selaras dengan PPN Kejawanan. Hal ini diakibatkan masing-masing Pelabuhan di Indonesia memiliki banyak variabel pendukung dan ciri khas kondisi sosiodemografi yang berbeda.

Namun tetap pada teori dan impresi dari negara yang telah melakukan PIT, bahwa terobosan **Penangkapan Ikan Terukur** diharapkan dapat menghasilkan keterukuran nilai produksi dan *multiflier effect*-nya sebagai indikator ketahanan ekonomi, terukur batasan penangkapan sebagai indikator ketahanan ekosistem, serta, dan terukur pendapatan dan kesejahteraan nelayan sebagai indikator ketahanan sosial-ekonomi nelayan.

4. Konklusi

Pencanaan kebijakan PIT benar-benar hal baru bagi sistem kelola kelautan dan perikanan di Indonesia yang diadopsi melalui *branchmarking* dari beberapa negara maju. Namun, minimnya pengalaman konkrit terkait penerapan keterukuran, kondisi sosiodemografi di Indonesia yang unik, dan kompleksitas ekosistem perikanan tangkap laut Indonesia yang meliputi multi-species, multi-gear, dan multi-stakeholder, memiliki tantangan tersendiri untuk mewujudkannya.

Melihat berbagai kontroversi yang berkembang di masyarakat, PR pemerintah tentu akan bertambah banyak. Pemerintah sudah semestinya giat mengkaji ulang seluruh argumentasi publik yang masih gamang sehingga dapat menjawab seluruh kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat.

Secara teori, sistem penangkapan ikan terukur begitu banyak membawa keunggulan pengelolaan kelautan dan perikanan untuk tetap sehat. Namun, teori tetap saja akan menjadi teori apabila belum mampu dipraktikkan di lapangan. Pemerintah harus tetap bekerja lebih ekstra untuk menunjukkan bahwa kebijakan ini tepat diterapkan untuk Indonesia.

If your ship doesn't come in swim out to it

Jonathan Winters